

Pemanfaatan e-Form Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Bagi Wirausaha dan UMKM di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran (*Utilization of the e-Form for Income Tax Notification for Entrepreneurs and MSMEs in Purworejo Village, Negeri Katon District, Pesawaran Regency*)

Kamadie Sumanda Syafis^{1*}, Lidya Ayuni Putri², Ambya Ambya³, Edwin Russel⁴, Sudrajat Sudrajat⁵

Universitas Lampung, Lampung^{1,2,3,4,5}

kamadiesumanda@gmail.com^{1*}, lidyaayuputri@gmail.com², ambya@gmail.com³, winrush08@gmail.com⁴, sudrajat.unila@feb.unila.ac.id⁵



Riwayat Artikel

Diterima pada 10 Juni 2024

Revisi 1 pada 14 Juni 2024

Revisi 2 pada 15 Juni 2024

Revisi 3 pada 24 Juni 2024

Disetujui pada 26 Juni 2024

Abstract

Purpose: The purpose of this community service activity is to assist in the reporting of tax returns (SPT) using electronic forms (e-Forms) and to provide a comprehensive understanding of the community and business actors. It is expected to empower and enhance the understanding of annual tax reporting for residents and business actors in Purworejo Village, Negeri Katon District, and the Pesawaran Regency.

Methodology: The implementation of this community service uses the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, a technique that enables the community to participate in making real action plans and monitoring and evaluating policies that affect their lives.

Results: Through the training and socialization organized in this community service, business actors in the village became more aware of their tax obligations. Consequently, they are more diligent in recording their business transactions and income, enabling them to complete the e-Form SPT more accurately.

Limitation: The results of this research may be difficult to announce because conditions in Purworejo Village may differ significantly from other villages or areas, making it difficult to generalize the findings.

Contribution: By using digital technology and e-Form SPT, MSMEs can be more effective in fulfilling their tax reporting obligations and managing their administration. This activity encourages MSMEs to adopt modern technology, increase tax compliance, and reduce administrative burden.

Keywords: *e-Form SPT, Income Tax, MSMEs*

How to cite: Syafis, K, S., Putri, L, A., Ambya, A., Russel, E., Sudrajat, S. (2024). Pemanfaatan E-Form Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Bagi Wirausaha dan UMKM di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Abdimas Multidisiplin*, 3(1), 19-25.

1. Pendahuluan

Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran memiliki banyak potensi usaha yang terus dikembangkan oleh masyarakat desanya. Kemajuan perekonomian yang ada di Desa Purworejo terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, dari sisi administrasi dan kewajiban perpajakannya banyak masyarakat yang berpenghasilan bahkan telah ber- NPWP tidak mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak. Disebabkan banyak aturan pajak yang selama ini dianggap sebagai

urusan yang paling sulit. Sehingga di Tahun 2021 muncul aturan baru terkait perpajakan yakni UU No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PP No 55 Tahun 2022 terkait penegasan pengenaan pajak penghasilan. Dua aturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi terutama usaha Mikro Kecil dan Menengah. Mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), saat ini juga DJP juga terus mensosialisasikan UU terbaru tersebut. Beberapa aturan diubah seperti besaran tarif berlapis sampai dengan batasan pendapatan yang tidak dikenakan pajak bagi para pelaku usaha. Perekonomian Indonesia dan hampir seluruh negara mengalami penurunan yang cukup tajam pada Tahun 2020 s.d 2021. Namun 2022 mengalami peningkatan dimana pertumbuhan ekonomi tidak lagi minus. Dampak kebijakan anggaran guna stimulus fiskal Indonesia yang dalam dua tahun terakhir mengalami defisit anggaran.

Kewajiban perpajakan terkait pemotongan pajak penghasilan telah diulas oleh beberapa penelitian. Andriani and Herianti (2016) menemukan bahwa pemahaman UMKM atas peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Mustofa, Consulting (2003) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Mardiasmo, 2009) menemukan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Tomohon tergolong cukup baik, namun, kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon masih rendah, berbanding terbalik dengan kemauan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian- penelitian tersebut membuktikan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak UMKM berpotensi pada pelaksanaan kewajiban perpajakannya (Wowor, Morasa, & Elim, 2014). Namun, untuk mendukung pengetahuan dan pemahaman tersebut, UMKM masih membutuhkan bimbingan dan informasi perpajakan.

2. Metode

2.1. Metode dan Tahapan Kegiatan

Metode kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan beberapa cara sehingga pemahaman peserta kegiatan dapat meningkat dan dapat mengurangi resiko kesalahan dalam pemotongan pajak penghasilan. Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode *participatory rural appraisal* (PRA) yaitu teknik yang memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam membuat tindakan nyata rencana, pengawasan, dan evaluasi kebijakan yang berpengaruh pada kehidupannya.

Berikut adalah prinsip-prinsip PRA (Sinaga, Akadiati, & Purwanti, 2022):

- 1) Masyarakat dipandang sebagai subjek bukan objek
- 2) Orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku
- 3) Tim pengabdian memposisikan dirinya sebagai insider bukan outsider
- 4) Fokus pada topik utama permasalahan
- 5) Pemberdayaan dan partisipatif masyarakat dalam menentukan indikator sosial (indikator evaluasi partisipatif). Kemampuan masyarakat ditingkatkan melalui proses pengkajian keadaan, pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, peilaian, dan koreksi terhadap kegiatan yang dilakukan
- 6) Keterlibatan semua anggota kelompok dan menghargai perbedaan
- 7) Konsep triangulasi. Untuk bisa mendapatkan informasi yang kedalamannya dapat diandalkan, bisa digunakan konsep triangulasi yang merupakan bentuk pemeriksaan dan pemeriksaan ulang (*check and recheck*)
- 8) Optimalisasi hasil.

Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses program, program itu akan lebihsesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tingkat kepedulian masyarakat dalam menjalankan program/kebijkan akan lebih tinggi. Pengabdian masyarakat ini membantu masyarakat untuk memahami, penghitungan dan pelaporan pajak sehingga membantu Dirjen Pajak dalam mensosialisasikan pajak bagi pelaku usaha di desa.

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat

ini melalui tahapan berikut:

1) Perencanaan

Agar program ini berjalan maksimal, maka diperlukan perencanaan yang tepat, di antaranya:

- Menganalisis kondisi masyarakat desa yang berkaitan dengan pemahaman tentang kewajiban pemotongan pajak penghasilan.
- Mengamati pentingnya mengadakan program keberlanjutan
- Menyusun waktu pelaksanaan kegiatan
- Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan dalam implementasi pelaksanaan pengabdian
- Mempersiapkan tim pelaksana untuk melakukan kegiatan pengabdian

2) Pelaksanaan

Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses program, program itu akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tingkat kepedulian masyarakat dalam menjalankan program/kebijakan akan lebih tinggi. Pengabdian masyarakat ini membantu masyarakat untuk memahami, penghitungan dan pelaporan pajak sehingga membantu Dirjen Pajak dalam mensosialisasikan pajak bagi pelaku usaha di desa.

- Melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan daring/luring tentang pajak penghasilan, yang disertai dengan memberikan bahan yang dapat membantu mempercepat pemahaman masyarakat desa dengan memberikan video tutorial.
- Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha yang ber NPWP
- Mengevaluasi hasil dari diskusi, kemudian melakukan kegiatan pendampingan untuk memberikan solusi bagi masyarakat desa.

3) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- Melakukan evaluasi dan monitoring hasil kegiatan untuk memastikan efektifitas kegiatan dan saran untuk perbaikan kedepan. Ini adalah aplikasi dari konsep triangulasi pada metode PRA.
- Melakukan pelaporan kegiatan dan diseminasi.

2.2. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- Ceramah. Metode yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak SPT Tahunan untuk para pelaku usaha di desa melalui metode ceramah. Materi yang disampaikan dimulai dengan memberikan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, aspek perpajakan pada pelaku usaha, termasuk didalamnya Undang-undang pajak, peraturan, dan UU Harmonisasi peraturan perpajakan, kemudian setelah itu akan masuk pada teknis pelaporan *e-Form*
- Tutorial (pendampingan). Metode ini penting karena pajak secara umum menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak menghitung, dan melaporkan sendiri kewajiban
- pajaknya, sehingga jika tidak memahami tata caranya maka menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha. Selain itu saat ini semua prosedur perpajakan saat ini menggunakan sistem online pada aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh dirjen pajak, maka pada tahap ini peserta akan diberikan praktik mengoperasikan e Form terbaru yang diterbitkan oleh direktorat jenderal pajak.
- Diskusi. Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan kewajiban pajak yang mereka alami selama ini.

2.3. Prosedur Kerja

Prosedur kerja dalam kegiatan ini dapat dijelaskan dengan diagram berikut:



2.4. Pihak yang Terlibat

Pihak yang terlibat pada kegiatan ini adalah para pelaku usaha terutama yang telah ber NPWP di Desa Purworejo, dan tim pengabdian yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

2.5. Partisipasi Mitra

Agar pengabdian masyarakat ini mengenai sasaran, maka pengabdian ini melibatkan para pelaku usaha yang ada di desa pada khususnya Desa Purworejo, dimana telah menjalin hubungan baik dengan FEB Universitas Lampung, yang berpartisipasi sebagai peserta pelatihan dan sasaran pengabdian ini.

2.6. Rancangan Evaluasi Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung akan dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama tim akan membagikan kuesioner tentang pemahaman peserta terhadap form biasa dan kewajiban pelaporan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peserta memiliki pengetahuan terkait materi sebelum pelatihan untuk dan pendampingan. Evaluasi tahap kedua tim membagikan kembali kuesioner yang telah dibagikan diawal kegiatan dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan pengabdian yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh tim pengabdian. Tahap ketiga adalah melakukan evaluasi hal-hal apa yang harus dilakukan oleh tim untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta tentang e-Form dan memberikan saran untuk kegiatan berikutnya.

Kegiatan ini diharapkan akan terlaksana secara berlanjut dan terus berkembang. Kami berharap kami dapat melanjutkan program pengabdian ini dengan membuat sebuah konsultasi berbasis web untuk segala permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di desa terutama yang terkait dengan e Form SPT pajak penghasilan. Selain itu kami dapat bekerjasama dengan mahasiswa untuk membuat sebuah kegiatan yang akan membantu simulasi penggunaan e Form dan peningkatan dalam memahami kewajibannya terutama di bidang perpajakan sehingga akan meningkatkan kemajuan desa dan dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan desanya.

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang dosen tetap Universitas Lampung yang dipimpin oleh satu orang ketua dan 2 orang anggota tim serta 2 orang mahasiswa FEB Unila. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2023, dengan berdiskusi langsung dengan kepala desa dan perangkat desa. Agenda yang dilakukan membahas persiapan kegiatan pengabdian. Pelaksanaan kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 11 Juli 2023 berlokasi di Aula Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta, dimana pesertanya adalah pelaku UMKM yang telah ber NPWP. Kegiatan pertama ini dilakukan pre-test untuk mengetahui sejauh tingkat pemahaman para pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakannya sebelum diberikan informasi tentang penggunaan e-Form SPT Tahunan. Kegiatan kedua dilakukan pada tanggal 17 Juli 2023 berlokasi di Aula Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini dihadiri oleh 24 peserta. Berikut ini foto kegiatan pengabdian yang dilakukan:



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian
Sumber: Dokumentasi

Pada tahap pelatihan pertama, tim Pengabdian Kepada Masyarakat FEB Unila menyampaikan materi dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang batasan penghasilan yang wajib dilaporkan dan penghasilan yang harus dibayar serta bagaimana perhitungan pajak penghasilan, alur penyetoran pajak yang telah dihitung, dan melaporkan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk e-Form. Diharapkan sebagai upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan pemahaman pajak bagi para pelaku UMKM. Peserta yang hadir sangat antusias ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan baik mengenai aturan pajak penghasilan maupun hal-hal di luar materi yakni pajak penghasilan dari usaha lainnya dan terkait pajak kendaraan.

Pada tahap awal kegiatan, tim pengabdian memberikan daftar pertanyaan pre-test untuk mengukur pengetahuan peserta yang hadir tentang pajak penghasilan dan pelaporan SPT UMKM. Setelah kegiatan penyampaian materi selesai. Tim pengabdian melaksanakan post- test dengan daftar pertanyaan yang sama untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Berikut ini adalah nilai rata-rata pre-test dan post-test peserta:

Tabel 1. Nilai Rata-Rata Pre-test dan Post Test

No	Materi	Nilai Pre-Test	Nilai Post-Test 1	Nilai Post Test 2
1	Kewajiban Pelaporan	34	72	73
2	Pajak Penghasilan UMKM	35	74	73
3	Pelaporan SPT	40	77	78
4	Pemanfaatan e Form SPT	30	76	77
Total Nilai		139	299	301
Rata-Rata Nilai		34,75	74,75	75,25

Berdasarkan data tabel di atas, rata-rata nilai Pre-Test yang dihasilkan oleh peserta adalah 34,75 dimana nilai rata-rata tersebut relatif rendah dengan skala 1-100, artinya pemahaman peserta tentang kewajiban pelaporan, pajak penghasilan UMKM, pelaporan SPT, dan pemanfaatan e- Form SPT. Upaya memberikan pelatihan pendampingan bagi pelaku UMKM menjadi penting diberikan agar dapat memilih dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Sedangkan, rata-rata nilai Post-test 1 peserta adalah 74,75. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai pengetahuan peserta sebesar 40 dan selisih dengan hasil post test 2 sebesar 0,5. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan UMKM mereka dan tidak menjadi permasalahan di kemudian hari serta dapat memanfaatkan bahan dan contoh kasus dalam pelaporan SPT menggunakan e-Form (Nugroho, Liyana, Muamarah, & Wijaya, 2022).

3.2 Pembahasan

Pemanfaatan e-Form Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (e-SPT) bagi wirausaha dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, telah berhasil meningkatkan pemahaman wirausaha dan UMKM terkait perpajakan. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan dalam pengabdian ini, pelaku usaha di desa tersebut menjadi lebih peduli akan kewajiban perpajakan mereka. Hasilnya, mereka lebih cermat dalam mencatat transaksi dan pendapatan usaha mereka, sehingga dapat mengisi e- Form SPT dengan lebih akurat. Penggunaan e-Form SPT juga telah meningkatkan efisiensi dalam pelaporan pajak bagi wirausaha dan UMKM di Desa Purworejo. Sebelumnya, proses manual dalam pengisian dan pengiriman SPT seringkali memakan waktu dan biaya yang signifikan. Dengan adanya e-Form SPT, mereka dapat mengisi SPT dengan lebih cepat dan mudah, dan mendapatkan kepastian hukum terkait pelaporan pajak mereka. Hal ini memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya mereka untuk mengembangkan usaha mereka.

Salah satu dampak positif dari pemanfaatan e-Form SPT adalah peningkatan penerimaan pajak negara. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, wirausaha dan UMKM di Desa Purworejo lebih cenderung untuk melaporkan pendapatan mereka dengan lebih jujur. Hal ini

berkontribusi langsung pada peningkatan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur negara yang akan berdampak pada meningkatnya dana desa. Pengabdian ini juga memberikan dampak positif dalam hal pemberdayaan pelaku usaha dan pengembangan UMKM di Desa Purworejo. Dengan pemahaman perpajakan yang lebih baik, pelaku usaha dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien. Mereka dapat memanfaatkan kebijakan pajak yang mendukung pengembangan usaha mereka, seperti insentif pajak untuk UMKM. Ini berkontribusi pada pertumbuhan UMKM yang lebih berkelanjutan di tingkat desa. Meskipun terdapat dampak positif yang signifikan, pemanfaatan e-Form SPT juga menghadapi beberapa tantangan dan kendala. Beberapa pelaku usaha mungkin masih kesulitan dalam mengoperasikan teknologi dan e-Form SPT (Gultom, Salsabila, Lodan, Dompok, & Hairri, 2023). Selain itu, adanya masalah konektivitas internet di beberapa wilayah desa juga menjadi hambatan dalam pengisian e-Form SPT.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memanfaatkan e-Form Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai alat untuk melaporkan dan mengelola kewajiban perpajakan mereka. Dengan menggunakan teknologi digital dan e-Form SPT, UMKM dapat lebih efektif dalam proses melaksanakan kewajiban pelaporan pajak serta pengelolaan administrasi mereka. Kegiatan ini mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi modern, meningkatkan ketaatan pajak, dan mengurangi beban administratif. Melalui pemanfaatan e-Form SPT, diharapkan UMKM dapat memperkuat basis pajak negara, sementara pemerintah mendapatkan informasi yang lebih akurat untuk kebijakan perpajakan lebih lanjut. kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat berkelanjutan dengan meningkatkan pertumbuhan UMKM secara ekonomi dan kontribusi positif terhadap sistem perpajakan saat ini.

Limitasi dan studi lanjutan

Tidak ada penelitian yang mencakup semua aspek. Penulis disarankan untuk menjelaskan limitasi penelitian, dan juga studi lanjutan atau rencana ke depan.

Setelah dilakukan kegiatan pengabdian ini, berikut saran yang dapat diberikan:

- 1) Perlu Penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis yang lebih intensif untuk membantu pelaku usaha yang masih kesulitan dengan teknologi.
- 2) Peningkatan infrastruktur internet di wilayah desa yang masih mengalami kendala konektivitas.
- 3) Sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat dari pemanfaatan e-Form SPT dan kebijakan perpajakan yang mendukung UMKM.
- 4) Kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan teknologi dan pendidikan perpajakan di tingkat desa.

Dengan langkah-langkah ini, pemanfaatan e-Form SPT dapat terus ditingkatkan untuk mendukung perkembangan wirausaha dan UMKM di Desa Purworejo serta wilayah-wilayah desa lainnya.

Ucapan terima kasih

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang terlibat terutama kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung dan Pemerintah desa di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.

Referensi

- Andriani, Y., & Herianti, E. (2016). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015).
- Consulting, B. (2003). Tax Simplicity and Stability: Attractive to Countries and Investors: United Stated: BG Consulting, Inc.
- Gultom, D. N., Salsabila, L., Lodan, K. T., Dompok, T., & Hairi, M. I. A. (2023). Peran Humas Pemerintah terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak di Kota Batam. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 3(1), 17-29.
- Liou, K. T. (2007). Applying good governance concept to promote local economic development: contribution and challenge. *International Journal of Economic Development*, 9(1/2), 1.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan edisi revisi 2009.
- Naftali, R. (2015). Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (Bpk) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.
- Nugroho, R., Liyana, N. F., Muamarah, H. S., & Wijaya, S. (2022). Relawan Pajak 2021: Upaya Menjaga Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pendampingan Pengisian SPT secara Daring. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 157-165.
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2011). Dinamika good governance di tingkat desa. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 1-13.
- Prasetyo, A. G., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16-31.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan kasus.
- Rusmianto, R., Maryani, M., & Makhsun, A. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 12(1), 32-44.
- Sinaga, I., Akadiati, V. A. P., & Purwanti, A. S. M. (2022). Persepsi Kemudahan, Kebermanfaatan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filling. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 1(1), 25-33.
- Wowor, R. A., Morasa, J., & Elim, I. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filling. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3).
- Yuliasari, W. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ponorogo)*. Universitas Brawijaya.